

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1 Konsep Pembangunan**

Menurut pengertian ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama (Todaro : 2008). Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan dan meningkatkan produktivitas. Untuk itu sebelum berbicara pembangunan, beberapa para ahli memberikan gagasannya mengenai pembangunan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Menurut Deddy T. Tikson, bahwa pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi , transformasi dalam struktur sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme,

disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Menurut Jakob Oetama Pembangunan ialah usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apapun usaha yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat masuk dalam kategori pembangunan. Menurut Todaro, merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik. (Todaro:2005)

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa / *nation-building*. Dari definisi diatas akan muncul tujuh ide pokok:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka waktu pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, yang dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pembangunan
5. Pembangunan mengarah modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.

7. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga semakin kukuh fondasinya dan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain. (Sondang P. Siagian: 2001)

Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa *pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.*

## **2. 2 Indikator Pembangunan**

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan

Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut :

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah

akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

### 3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

### 4. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. *Finansial capital* merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

## 5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Quality of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam

pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge, attitude dan skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

### **2. 3 Tujuan dan Manfaat Pembangunan**

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya melanjutkan apa yang telah dibangun, membangun yang belum dibangun dan menambah bagian-bagian baru sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip pembangunan seperti ini yang perlu dilaksanakan dalam sebuah kepemimpinan di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga

kesinambungan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan pada periode lima tahun sebelumnya, maka untuk memelihara serta melanjutkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan dimaksud demi mencapai masyarakat daerah yang maju, mandiri, damai dan sejahtera, perlu ditetapkan visi – misi Pembangunan yang hendak dilaksanakan dalam periode lima tahun kepemimpinan pasangan yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Visi-Misi yang ditetapkan hendaknya jelas sasaran yang hendak dibangun, sasaran yang dibangun itu dikehendaki menjadi apa setelah lima tahun baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya berazaskan nilai-nilai Pancasila .

Tujuan utama pembangunan bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan dan pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Tiga tujuan inti pembangunan adalah (1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan, (2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, (3) perluasan rentang pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa, yakni membebaskan mereka dari ketergantungan (Todaro:2005)



Selain itu ada kaitan antara tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan pembangunan nasional dengan dimensi jangka waktu pendek dan panjang yaitu:

1. Tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek yang berhubungan dengan tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya.
2. Tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pada tahap awal pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan harapan akan berpengaruh pada bidang lain.

## **2. 4 Pembangunan Sosial Ekonomi dan Strategi Adaptasi**

### **2. 4. 1 Pembangunan Sosial**

Aspek sosial merupakan salah satu yang dapat dirasakan dalam pembangunan. Sosial dapat dikategorikan dalam 5 kategori pokok yaitu “kehidupan sehari-hari”, “lawan kata individual”, “manusia sosial”, “lawan kata dari ekonomi” dan “hak asasi masyarakat” (Conyers:1994). Pembangunan sosial memberikan beberapa terminologi yaitu sebagai pembangunan alternatif, pembangunan berbasis rakyat dan pembangunan partisipatoris. Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul

dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Pembangunan yang berfokus pertumbuhan yang menempatkan uang sebagai yang paling pokok (*capital centered development*) berubah menjadi pembangunan sebagai proses yang manusiawi (*people centered development*). Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Evolusi (Evolution Theory)

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu *unilinear theories of evolution*, *universal theories of evolution*, dan *multilined theories of evolution*.

##### a. Unilinear Theories of Evolution

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer.

## b. Universal Theories of Evolution

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen.

## c. Multilined Theories of Evolution

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan.

## 2. Teori Konflik (Conflict Theory)

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.

Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini.

- a. Setiap masyarakat terus-menerus berubah.
- b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat.
- c. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik.
- d. Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.

### 3. Teori Fungsionalis (Functionalist Theory)

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah *cultural lag* (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau *cultural lag*.

Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn.

Secara lebih ringkas, pandangan Teori Fungsionalis adalah sebagai berikut:

- a. Setiap masyarakat relatif bersifat stabil.
- b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat.
- c. Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi.
- d. Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok masyarakat.

#### 4. Teori Siklis (Cyclical Theory)

Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Sementara itu, beberapa bentuk Teori Siklis adalah sebagai berikut :

##### a. Teori Oswald Spengler

Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami empat tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar seribu tahun.

#### b. Teori Pitirim A. Sorokin

Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi.

- 1) Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.
- 2) Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.
- 3) Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.

#### c. Teori Arnold Toynbee

Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya. Pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Edi Suharto mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. (Suharto, Edi :2010)

Manusia merupakan makhluk biopsikososial yang terdiri dari aspek biologis (tubuh), psikis (kejiwaan), dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan aspek fisik saja dianggap tidak mencukupi kebutuhan manusia. Pembangunan ekonomi yang berjalan selama ini pada kenyataannya lebih terfokus pada pembangunan fisik seperti pertumbuhan GNP dan pembangunan gedung-gedung, sementara pemerataan hasil pembangunan dan penjagaan lingkungan kurang diperhatikan, sehingga proses pembangunan justru menciptakan jarak semakin lebar antara yang kaya dan miskin, serta mengancam keberlangsungan lingkungan. Menurut Adi, tujuan Pembangunan sosial pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan (Adi : 2008). Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas perseorangan dan institusi mereka, memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial.

Pendekatan pembangunan sosial untuk kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan sosial memiliki delapan karakteristik :

1. Proses pembangunan sosial terkait dengan pembangunan ekonomi.
2. Memiliki fokus yang interdisiplin, di mana ia menggambarkan sudut pandang dari beragam ilmu sosial.
3. Menunjukkan sebagai proses.
4. Proses perubahannya bergerak maju secara alami.
5. Proses pembangunan sosial bersifat intervensionis.
6. Memiliki strategi yang beragam.

7. Menekankan pada populasi sebagai suatu kesatuan (cakupannya bersifat universal atau inklusif).
8. Bertujuan mempromosikan atau mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial.

Secara lebih luas mengenai pembangunan sosial bahwa menurut Adi adalah “*development of the capacity of people to work continuously for their own and society's welfare*”. Pembangunan sosial menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pembangunan dan ekonomi sebagai cara untuk melayani kebutuhan manusia.

Menurut Midgley, pembangunan sosial memiliki tiga strategi besar yaitu:

1. Pembangunan sosial oleh individu, dikenal juga sebagai pendekatan individualis atau perusahaan. Akar ideologinya adalah liberal atau individualis, di mana ideologi tersebut menekankan pada pentingnya kebebasan individu dalam memilih. Pendekatan individualis atau perusahaan memang saat ini tidak populer dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini dipromosikan melalui peningkatan fungsi sosial individu dan hubungan antarpribadi. Dalam strategi ini, individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan guna memberdayakan masyarakat.
2. Pembangunan sosial oleh komunitas dikenal juga sebagai pendekatan komunitarian. Pendekatan komunitarian sendiri dipengaruhi kuat oleh ideologi populis. Strategi ini percaya bahwa antara masyarakat dan komunitas memiliki kemampuan yang saling terkait untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, masalah sosial mereka teratasi, dan kesempatan untuk maju



tersedia. Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat dan komunitas perlu saling bekerja sama melalui pengembangan komunitas lokalnya.

3. Pembangunan sosial oleh pemerintah dikenal pula sebagai pendekatan statis. Pendekatan statis didasari oleh ideologi kolektivis atau sosialis di mana ia menekankan pada pentingnya kolektivitas. Kumpulan ini dibangun dari asosiasi masyarakat yang memiliki sumber daya secara kolektif dan membagi wewenang untuk membuat keputusan. Melalui strategi tersebut, pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi dalam pemerintahan. Di samping adanya partisipasi individu dan masyarakat, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah kebijakan pembangunan sosial diimplementasikan dan apakah kebijakan sosial dan ekonomi diselaraskan. (Midgley : 2000)

Menurut Midgley model pembangunan sosial pada dasarnya menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan dengan tujuan : *pertama* menumbuhkembangkan potensi diri yang lemah secara ekonomi, *kedua* menyediakan dan memberikan pelayanan sosial khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang meningkatkan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan kedua hal ini diperlukan adanya intervensi pemerintah.

Dalam buku Conyers mengatakan bahwa faktor sosial yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan adalah (1) faktor manusia yang menyangkut lingkungan sosial budaya yang mempengaruhi cara mereka

merasakan kebutuhan dan mewujudkannya dalam program pembangunan, (2) pemenuhan kebutuhan sosial yang berkenaan dengan pelayanan sosial misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan atau pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, serta pemeliharaan kebudayaan tradisional, (3) keadilan sosial dengan memperhatikan dampak yang timbul dengan adanya berbagai ketimpangan antar individu atau kelompok, (4) pembangunan manusia seutuhnya. (Conyers:1994)

#### **2. 4. 2 Konsep Pembangunan Ekonomi**

Menurut pandangan Schumpeter (Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi ini disebabkan oleh perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

Pembangunan ekonomi adanya proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat memperbaiki menjadi lebih baik. Dalam Sukirno tahun 1996 berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dengan hal itu pembangunan diharapkan diharapkan memiliki kenaikan pendapatan riil masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bukan hanya merupakan gambaran ekonomi saja melainkan adanya pendapatan total yang dibagi jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensional yang kebijaksanaannya komprehensif baik ekonomi maupun nonekonomi. Oleh sebab itu, menurut Todaro sasaran pembangunan adalah :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
2. Meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai – nilai budaya manusiawi, yang semata – mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber – sumber kebodohan dan penderitaan.

Menurut Suryana pembangunan ekonomi ada empat model, yaitu pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, penyediaan lapangan pekerjaan, penghapusan kemiskinan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Orientasi pembangunan ekonomi di Indonesia lebih menekankan pada pertumbuhan yang mengakibatkan ketimpangan antara desa dan kota. Dalam konteks spasial, terjadi *urban bias* yang cenderung mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan yang diharapkan dapat menimbulkan efek penetasan (*trickle down effect*) ke wilayah *hinterland*-nya. Dengan hal ini telah terjadi transfer sumberdaya dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan.

Pembangunan yang melahirkan kemiskinan dan pengangguran struktural di pertanian dan perdesaan perlu mengintegrasikan pembangunan pertanian dan

perdesaan secara seimbang. Dalam hal ini semua *stakeholder* perlu terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk melakukan pengembangan wilayah yang harus memperhatikan pembangunan fisik wilayah (pembangunan jalan, bandara, terminal, dan lain-lain), sumber daya manusia dan sosial, dan aspek teknologi. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi :

1. Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik,

maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Pembangunan ekonomi yang berlangsung di suatu negara membawa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan ekonomi, yaitu:

- a. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
- b. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran.
- c. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
- d. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.
- e. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari dampak – dampak positif yang ada, terdapat juga dampak negatif dari pembangunan ekonomi, seperti halnya :

- a. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.
- b. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
- c. Hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani

### **2. 4. 3 Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada fase awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah yang dibiayai dari APBN murni. Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, manajemen operasionalnya juga membutuhkan *cost* yang tinggi. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara berkembang dalam pemenuhan infrastruktur. Namun kendala keterbatasan pembiayaan dari pemerintah tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan pola kerjasama yang bersifat *Public Private Partnership* yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Pendekatan baru untuk dapat mengurangi masalah ini melibatkan peran-peran *stakeholder*.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu strategi dalam penyediaan sarana yang utama untuk itu seperti diungkapkan dalam Infrastruktur Indonesia

(Kadin Indonesia-Jetro, 2006) yaitu Prinsip Dasar Penyediaan Infrastruktur secara keseluruhan antara lain:

1. Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktivitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.
2. Keterkaitan infrastruktur dengan berbagai aspek, agar peran infrastruktur dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan infrastruktur harus terkait dengan: (a) Bangkitan-bangkitan pembangunan yang lainnya; (b) Pembangunan pertanian, perkebunan, budi daya pantai, kelautan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, pertambangan, migas dan sebagainya; (c) Masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran pelayanan infrastruktur tersebut dan kemampuan dalam membayar jasa layanan infrastruktur; (d) Institusi pengelolanya, misalnya peran pemerintah dalam pengelolaan atau pemeliharaan serta memberi arahan dalam bentuk regulasi sebagai bentuk layanan publik dan (e) Dalam konteks privatisasi, investasi infrastruktur perlu mempertimbangkan minat investor, tujuan yang dikehendaki investor, syarat-syarat investasi dan insentif bagi investor
3. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan melalui kombinasi antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang digagas pemerintah daerah. Seiring dengan diimplementasikannya desentralisasi fiskal dan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi daerah, setiap daerah

diharapkan mampu lebih mengembangkan potensi daerahnya. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan di daerah harus didasarkan pada kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Untuk itu perlu kerangka pembangunan yang digagas pemerintah daerah, disamping kerangka model yang digagas pemerintah pusat yang selama ini digunakan. Yang dimaksud dengan adanya perencanaan yang digagas pemerintah daerah adalah terdapat rencana indikasi kebutuhan infrastruktur secara lokal dan regional, sehingga perencanaan tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Sedangkan rencana pembangunan infrastruktur yang bersifat digagas pemerintah pusat dan dikoordinasikan oleh kantor Menko Perekonomian.

4. Keberhasilan kerjasama Pemerintah dan Swasta memerlukan kondisi yang harus dipenuhi, yaitu: (a) Stabilitas kerangka ekonomi makro; (b) Sektor keuangan yang efisien dan berkembang; (c) Kerangka kebijakan yang mantap; (d) Penerimaan proyek yang berkelanjutan; (e) Adanya mekanisme arbitrase atau penyelesaian penyelesaian yang jelas; (f) Undang-Undang perbankan yang berkembang dengan baik dan (g) Adanya investasi pendamping dari pinjaman pemerintah/ekuitas/subsidi (Kewajiban Sektor publik).
5. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.



6. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus mendasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan. (Afandi, 2008)

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukkan hasil yang memadai untuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.*

#### **2. 4. 4 Strategi Adaptasi**

Adaptasi merupakan penyesuaian, daya tahan atau kemampuan merespon individu, kelompok atau masyarakat terhadap lingkungan atau sesuatu kondisi baru yang dialaminya. Langkah – langkah atau cara yang diambil individu atau masyarakat dalam menyesuaikan diri atau memperkuat daya tahannya terhadap lingkungan disebut strategi adaptasi. Marzali dalam Marrung (2011) mengemukakan bahwa strategi adaptasi adalah perilaku manusia dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki dalam menghadapi masalah – masalah sebagai pilihan – pilihan tindakan yang tepat guna sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, ekonomi dan ekologis di tempat dimana mereka

hidup. Kemampuan individu dalam beradaptasi mempunyai nilai bagi kelangsungan hidupnya, sehingga makin besar kemampuan adaptasi individu maka makin besar pula kemungkinan kelangsungan hidupnya.

Adaptasi merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia sebagai akibat adanya kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, kelompok maupun unit sosial terhadap norma, proses perubahan maupun suatu kondisi yang diciptakan (Wahyudi, 2007). Wahyudi (2007) mengemukakan bahwa masyarakat yang miskin memiliki dan mengembangkan strategi tertentu untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga apa yang dalam pandangan pihak luar merupakan tindakan *irrational* dalam kenyataannya merupakan satu-satunya pemecahan dari himpitan kesulitan sosial ekonomi.

Mosser dalam Simarmata (2009) mengemukakan berbagai pengelolaan asset sebagai strategi adaptasi yaitu :

- a. Aset tenaga kerja : misalnya meningkatkan keterlibatan wanita dan anak dalam bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga.
- b. Aset modal manusia : misalnya memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas seseorang atau bekerja atau keterampilan dan pendidikan yang menentukan umpan balik atau hasil kerja terhadap tenaga yang dikeluarkannya.
- c. Aset produktif : misalnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan lainnya.

- d. Aset relasi rumah tangga atau keluarga : misalnya memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme “uang kiriman”
- e. Aset modal sosial : misalnya memanfaatkan lembaga – lembaga sosial lokal, arisan dan pemberi kredit dalam proses dan sistem perekonomian keluarga.

Edi Suharso dalam Simarmata (2009) mengemukakan bahwa strategi adaptasi dalam mengatasi tekanan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Strategi Aktif : yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga untuk (misalnya melakukan aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan sumber atau tanaman liar di lingkungan sekitar dan sebagainya)
- b. Strategi pasif : yaitu mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya)
- c. Strategi Jaringan Pengamanan : misalnya menjalin relasi , baik secara informal maupun formal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan (misalnya : meminjam uang tetangga, mengutang ke warung, memanfaatkan program anti kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau bank, dan sebagainya)

Selanjutnya Wahyudi (2007) mengemukakan strategi adaptasi dalam mengatasi tekanan nonekonomi dikelompokkan menjadi :

- a. Strategi Aktif : yaitu melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan dukungan emosional (misalnya lebih giat dalam beribadah , mencari nasihat orang lain)

- b. Strategi Pasif : yaitu berusaha menghindari resiko yang diakibatkan oleh goncangan nonekonomi (misalnya mengurangi biaya sosial, kesehatan, pendidikan dan pasrah pada keadaan)
- c. Strategi Jaringan : yaitu menjalin relasi untuk memperoleh bantuan baik secara informal maupun formal dari pihak lain (misalnya teman, tetangga, sanak keluarga)

## **2. 5. Batasan Penelitian**

Karena keterbatasan peneliti dan agar lebih terinci dan terarah, maka penelitian ini dibatasi dalam upaya mengungkap informasi mengenai dampak pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Secara spesifik masalah – masalah penelitian ini dibatasi pada:

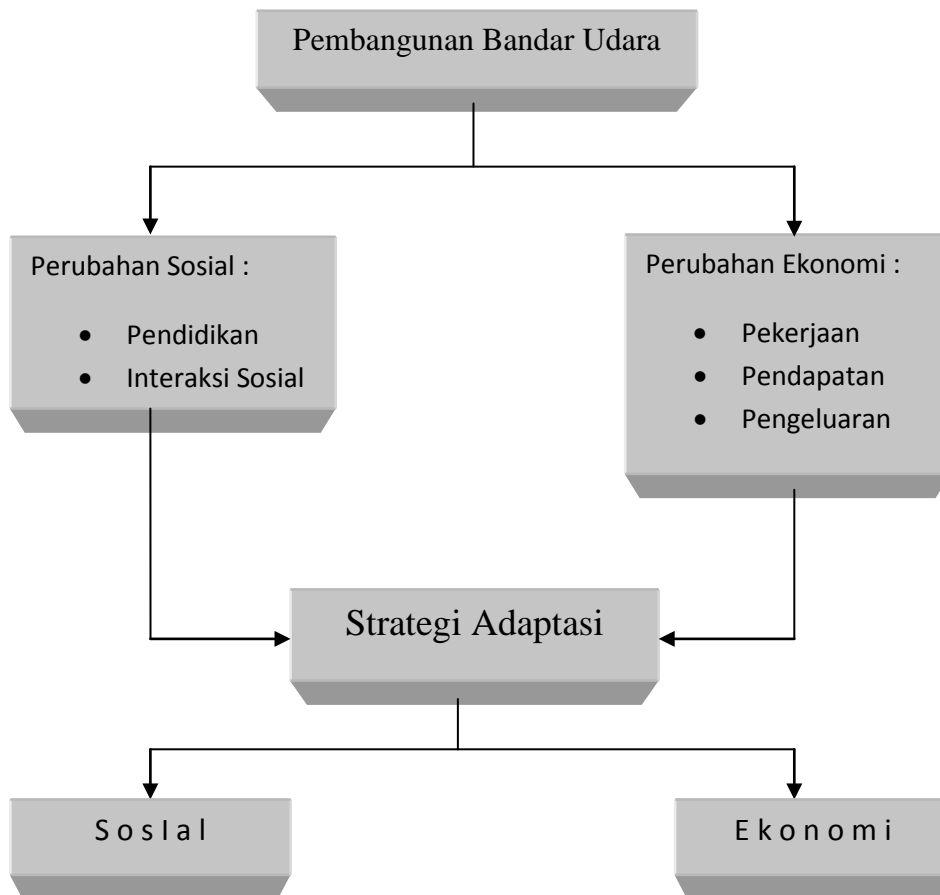
- a. Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik yang diberikan oleh pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu. Pembangunan tersebut diamati dari perbandingan kondisi sosial ekonomi masyarakat antara sebelum dan sesudah KNIA dibangun.
- b. Bandara Internasional Kuala Namu yang dimaksud bukan hanya bangunan bandarannya saja, melainkan satu kesatuan termasuk sarana dan prasarana yang dibangun untuk mendukung keberadaan bandara tersebut.
- c. Pusat pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dapat memberikan daya tarik sehingga dapat memicu perkembangan ekonomi di wilayah sekitarnya.

- d. Persepsi masyarakat mengenai sosial ekonomi masyarakat setempat, terdiri dari jumlah pendapatan dan pengeluaran, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.
- e. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- f. Karakteristik sosial ekonomi merupakan ciri – ciri khusus yang ada pada seseorang, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sosial ekonomi sesuatu hal atau aktivitas yang menyangkut seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya dan cara-cara hidup yang diterima dari perubahan yang ada.
- g. Strategi adaptasi adalah langkah-langkah atau cara yang diambil individu ataupun kelompok masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

## **2. 6 Defenisi Konsep**

- a. Kehidupan Perubahan Sosial : suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya seperti pendidikan, interaksi sosial, dan lain – lain.
- b. Kehidupan Ekonomi : kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran.
- c. Strategi Adaptasi : perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam menghadapi perubahan – perubahan sebagai pilihan – pilihan yang tepat guna dengan lingkungan sosial dan ekonomi di lingkungan.

## 2.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**